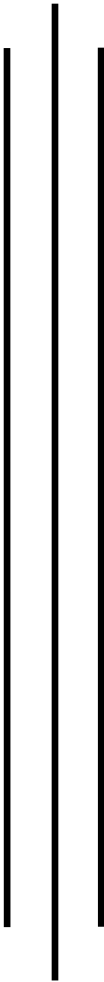


LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2027





RENCANA KERJA TAHUN 2027



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pemerintahan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam

Batam, 22 Juli 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM



DR. RIDWAN AFANDI, S.STP., M. Engg
Pembina Utama Muda / IV C
NIP 19820131 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.	7
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025	7
2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025	8
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	8
2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025	10
2.3.2 Permasalahan	16
2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis	18
2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD	18
2.5 Inovasi Bidang Urusan dalam Upaya memberikan Pelayanan kepada Masyarakat	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027	22
3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	25
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2027	25
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, dan tematik lainnya sesuai bidang urusan	44
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	45
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	45
BAB VI PENUTUP	46
6.1 Catatan Penting	46
6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	46
6.3 Rencana Tindak Lanjut	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025	7
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025	7
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025	8
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Kota Batam	12
Tabel 2.5	Telaah pokok-pokok pikiran DPRD	18
Tabel 2.6	Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di Sekretariat DPRD	19
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027	23
Tabel 3.2	Keselarasn Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027	24
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	26
Tabel 4.2	Dukungan Program RKPD terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027	44
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Batam ..	45
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kota Batam ...	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	1
Gambar	1.2	Tahapan Penyusunan Renja	1
Gambar	1.3	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Pemerintahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

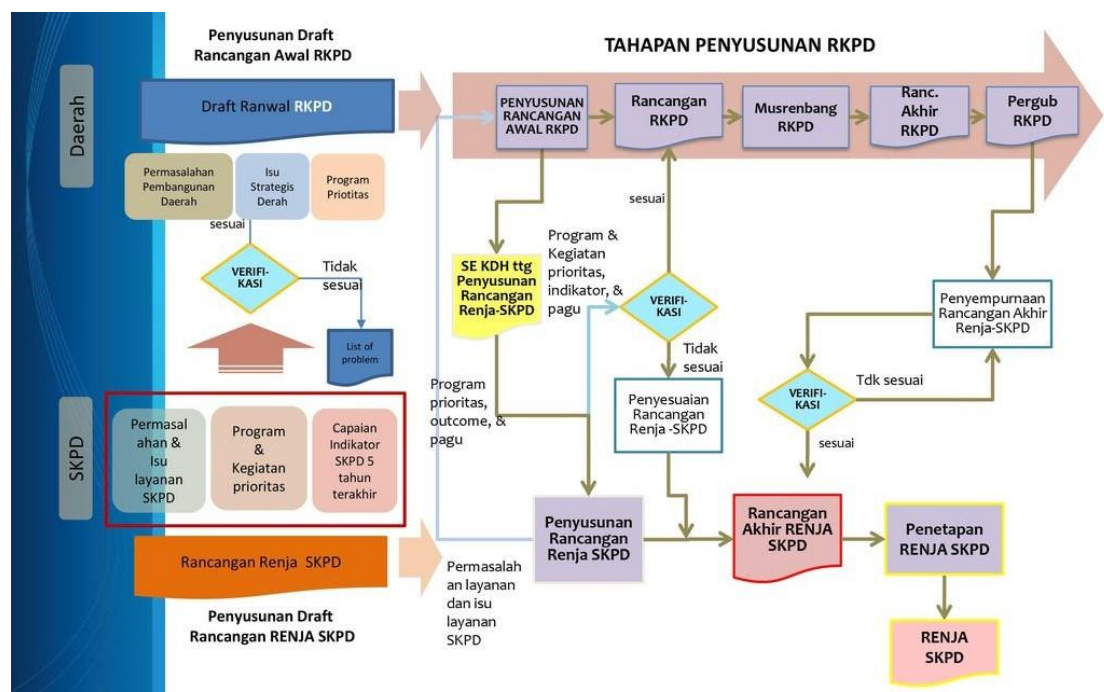
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

[illegible]

Adapun yang menjadi Dasar hukum Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
 11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1624);
 12. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2027

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam dengan

tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).

2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam merealisasikan target strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2025, capaian kinerja sepanjang tahun 2025 menunjukkan performa yang baik, dengan persentase realisasi rata-rata mencapai 91.59% dari keseluruhan target yang direncanakan.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Persentase		95	90	94,74	ST	97
2	Presentase Rancangan Produk Hukum Yang Difasilitasi Oleh DPRD	Persentase		90	94,44	100	ST	92
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat DPRD	Nilai		90	90	100	ST	94

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
	Ketepatan Penetapan Perda APBD	Nilai	Tepat	Tepat	Tepat	100	ST	Tepat
	Persentase Penetapan Ranperda	Persentase	90	90	90	100	ST	92

2.2 Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025

Untuk Sekretariat DPRD, SPM tidak wajib dan tidak diterapkan secara langsung seperti pada Dinas Teknis yang menyelenggarakan Urusan Pelayanan Dasar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menegaskan bahwa SPM hanya diberlakukan pada 6 urusan wajib pelayanan dasar.

Dengan demikian, evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam tidak menggunakan indikator SPM. Pengukuran kinerja Setwan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, meliputi dukungan administrasi, fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025
	Nihil				

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025 dan proyeksi RPJMD 2025-2029, Sekretariat DPRD Kota Batam masih menghadapi 4 permasalahan utama.

Pertama, dari aspek legislasi, kualitas produk hukum DPRD belum sepenuhnya berbasis kajian akademik dan Naskah Akademik yang mendalam. Hal ini menyebabkan pembahasan Ranperda di alat kelengkapan dewan masih memakan waktu lama dan rawan terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan di atasnya.

Kedua, dari aspek anggaran dan pengawasan, fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD belum berjalan optimal hingga tingkat kegiatan. Rekomendasi DPRD yang dihasilkan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD, serta integrasi Pokir ke dalam SIPD belum 100% tepat sasaran.

Ketiga, dari aspek kelembagaan dan SDM, jumlah ASN Setwan belum sebanding dengan beban kerja, khususnya untuk tenaga analis hukum dan analis anggaran. Kompetensi SDM juga belum merata, sehingga berdampak pada kecepatan dan kualitas layanan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Keempat, dari aspek sarana dan digitalisasi, implementasi sistem e-parlemen dan keterbukaan informasi publik belum berjalan penuh. Sarana ruang rapat dan alat persidangan juga belum memadai untuk menunjang kinerja 50 Anggota DPRD secara maksimal.

Secara umum, permasalahan tersebut menyebabkan efektivitas dukungan Setwan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD belum mencapai hasil yang optimal dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan analisis kritisal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Batam antara lain:

- a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan Keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.
- b. Penguatan Kapasitas SDM.
Penguatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.
- c. Optimalisasi Proses Legislasi.
Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Batam dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.
- d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kota Batam, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kota Batam termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota Batam.
- e. Peningkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.
Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislative untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan

berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

2.3.1 Evaluasi Hasil Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 sebagaimana Tabel 2.4 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya tidak sesuai target , diantaranya :
 - ✓ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Target yang di rencanakan sekitar 91 % namun realisasinya hanya 79.33%. Hal ini di sebabkan karena dari 50 (lima puluh) orang DPRD yang di rencanakan melakukan Medical Check Up, hanya sekitar 19 (Sembilan belas) orang saja yang melakukan Medical Check Up;
 - ✓ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, dari Target yang di rencanakan 81% hanya terrealisasi sekitar 29.17%. Ini disebabkan terdapat rapat-rapat fraksi yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya agenda DPRD lainnya.
 - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, diantaranya :
 - ✓ Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dari Target 91% hanya terrealisasi sebesar 74.44%, hal ini di sebabkan pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terdapat 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah yang tidak jadi dibahas dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan dan pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik terdapat beberapa rapat-rapat yang tidak dilaksanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya sudah sesuai target , diantaranya :
 - ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Target yang di rencanakan sekitar 100% dan capaiannya mendekati 100% yaitu 98.87%.
 - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdapat beberapa kegiatan yang sudah sesuai target yang sudah ditetapkan, diantaranya :

- ✓ Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, Target yang di rencanakan sekitar 90% dan capaiannya 90.33%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya melebihi target , diantaranya :
 - ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Target yang di rencanakan sekitar 93% dan capaiannya 100%.
 - ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Target yang di rencanakan sekitar 83% dan capaiannya 100%.
 - ✓ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Target yang di rencanakan sekitar 83% dan capaiannya 100%.
 - ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Target yang di rencanakan sekitar 98% dan capaiannya 100%.
 - ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Target yang di rencanakan sekitar 91% dan capaiannya 100%.
 - b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdapat beberapa kegiatan yang melebihi target yang sudah ditetapkan, diantaranya :
 - ✓ Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Target yang di rencanakan sekitar 83% dan capaiannya 100%.
 - ✓ Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Target yang di rencanakan sekitar 90% dan capaiannya 100%.
 - ✓ Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Target yang di rencanakan sekitar 70% dan capaiannya 92.90%.
 - ✓ Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Target yang di rencanakan sekitar 68% dan capaiannya 100%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Outcomes)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Sekretariat DPRD	94	0	90	90	100%	91	91	100%
		Nilai SAKIP PD	82,4	0	70,32	70,32	100%	76,1	76,1	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi	96 %	0 %	93 %	100 %	108%	94 %	94%	100%

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Outcomes)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		keuangan								
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95 %	0 %	93 %	100 %	108%	93 %	93%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	87 %	0 %	83 %	100 %	120%	83 %	83%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	84 %	0 %	82 %	100 %	122%	82 %	82%	100%

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Outcomes)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	93 %	0 %	93%	100 %	108%	93 %	93%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	94 %	0 %	91%	100 %	110%	92 %	92%	100%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	94 %	0 %	91%	87 %	96%	92 %	92%	100%
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan	84 %	0 %	81%	100 %	123%	82 %	82%	100%

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Outcomes)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Administrasi DPRD								
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	94 %	0 %	89 %	97 %	109%	92 %	92%	100%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	94 %	0 %	91%	100 %	110%	92 %	92%	100%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan	87 %	0 %	83%	100 %	120%	84 %	84%	100%

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Outcomes)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan								
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjudi	92 %	0 %	90%	100 %	111%	92 %	92%	100%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	84 %	0 %	84%	100 %	119%	84 %	84%	100%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi	85 %	0 %	85%	100 %	118%	85 %	85%	100%

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Outcomes)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Masyarakat yang ditindaklanjuti								
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Presentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	82 %	0 %	82%	0 %	0%	82 %	82%	100%
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	89 %	0 %	82%	100 %	122%	84 %	84%	100%

2.3.2 Permasalahan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Kompetensi aparatur:** Masih lemahnya kompetensi aparatur dalam mendukung kinerja Sekretariat DPRD yang semakin kompleks.

2. Administrasi dan Keuangan

- **Administrasi kesekretariatan dan keuangan:** Kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan masih rendah.
- **Pengelolaan arsip:** Penumpukan arsip dan kesulitan dalam menemukan arsip yang dibutuhkan dapat menghambat proses pengambilan keputusan.

3. Teknologi Informasi

- **Pemanfaatan teknologi:** Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang tersedia.

4. Organisasi dan Kelembagaan

- **Struktur organisasi:** Struktur organisasi belum sepenuhnya mengakomodasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja DPRD secara optimal.
- **Pengembangan kelembagaan:** Ketersediaan dan pemanfaatan sarana serta pengembangan kelembagaan masih perlu dioptimalkan untuk mengantisipasi hambatan eksternal.

5. Koordinasi dan Sinkronisasi

- **Koordinasi tugas:** Masih lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga lain.

6. Dukungan Tugas dan Fungsi

- **Dukungan pelaksanaan tugas:** Masih rendahnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara keseluruhan.

7. Peraturan Perundang-undangan

- **Perubahan regulasi:** Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas instansi pemerintah menyebabkan ketidakpastian

B. Permasalahan Eksternal

1. Koordinasi dan hubungan eksternal

- **Koordinasi yang lemah:** Kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tugas DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lain sering kali masih lemah.

- **Perubahan peraturan:** Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas instansi pemerintah menjadi tantangan eksternal yang harus dihadapi.
2. Dukungan dan fasilitas eksternal
 - **Teknologi informasi:** Pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia belum optimal, yang berdampak pada efisiensi operasional.
 - **Sarana dan prasarana:** Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi hambatan eksternal masih terbatas.
 3. Kualitas SDM dan kompetensi
 - **Kompetensi aparatur:** Masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDM) Sekretariat DPRD untuk mewujudkan institusi yang kapabel di bidangnya.
 4. Kualitas layanan
 - **Administrasi dan keuangan:** Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD.
 - **Dukungan tugas:** Rendahnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Analisis terhadap lingkungan internal Sekretariat DPRD Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai
2. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD
4. dengan DPRD Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
4. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodir secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis

Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam bersifat dinamis. Dari sisi eksternal, ada tuntutan digitalisasi, keterbukaan informasi, dan kebutuhan regulasi yang cepat seiring status Batam sebagai pusat investasi. Masyarakat juga menuntut DPRD lebih responsif terhadap aspirasi melalui Pokir dan reses. Dari sisi internal, Setwan menghadapi keterbatasan SDM, belum optimalnya sistem e-Parlemen dan SIPD, serta sarana pendukung yang masih perlu ditingkatkan untuk melayani 50 Anggota DPRD. Dampaknya, Setwan harus segera beradaptasi dengan memperkuat teknologi, kompetensi ASN, dan koordinasi agar mampu mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara efektif.

Sekretariat DPRD Kota Batam memiliki peluang besar dari dukungan kebijakan digitalisasi nasional melalui program e-Parlemen dan SPBE. Hal ini membuka kesempatan untuk mewujudkan tata kelola yang paperless, transparan, dan mudah diakses publik. Selain itu, posisi Kota Batam sebagai pusat investasi dan pembangunan menjadikan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD semakin strategis. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kinerja DPRD juga menjadi peluang bagi Setwan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan partisipasi publik.

Di sisi lain, Setwan masih menghadapi beberapa hambatan. Jumlah dan kompetensi ASN, khususnya analis hukum dan anggaran, belum sebanding dengan beban kerja dalam mendukung 50 Anggota DPRD. Integrasi sistem e-Parlemen dengan SIPD juga belum berjalan penuh sehingga proses administrasi masih semi manual. Keterbatasan sarana prasarana seperti ruang rapat dan alat persidangan, serta belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi DPRD oleh OPD, menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara umum, dengan memanfaatkan peluang digitalisasi dan dukungan publik, serta mengatasi hambatan SDM, sistem, dan sarana, Setwan diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih profesional kepada DPRD.

2.4 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Sekretariat DPRD Kota Batam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai urusannya, kinerja yang dilakukan tidak bersinggungan langsung dengan pokok-pokok pikiran DPRD kota batam sehingga target yang ingin dicapai Adalah Tingkat kepuasan dan kecukupan pelayanan terhadap kinerja anggota DPRD Kota Batam.

Tabel 2.5 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

N O	PENGUSUL	USULAN	URAIAN PEKERJAAN	ALAMAT LOKASI	STATUS	VOLUME	SATUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS	OPD TUJUAN AKHIR
	Nihil									

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD Kota Batam terus melakukan inovasi di bidang urusan pemerintahan penunjang. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan menjawab tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi kinerja DPRD. Dengan keterbatasan SDM dan tuntutan pelayanan yang semakin cepat, inovasi menjadi strategi utama Setwan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Beberapa inovasi yang telah dan akan dikembangkan Sekretariat DPRD Kota Batam antara lain: e-Parlemen Terintegrasi Digitalisasi proses fasilitasi rapat, reses, dan penginputan Pokir DPRD agar lebih cepat dan dapat dimonitor secara real time oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. Portal Keterbukaan Informasi DPRD: Penyediaan akses publik terhadap jadwal kegiatan DPRD, produk hukum daerah, dan hasil pengawasan melalui website dan media sosial resmi DPRD. Command Center Pelayanan DPRD: Pemusatan layanan administrasi, persuratan, dan pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD dalam satu sistem terpadu untuk mempercepat respon. Telaah Pokir Berbasis Data: Pemanfaatan data Bappeda dan OPD dalam proses telaah Pokir agar usulan DPRD lebih tepat sasaran dan terukur.

Dengan inovasi-inovasi tersebut, diharapkan pelayanan Sekretariat DPRD dapat lebih responsif, berbasis teknologi, dan mampu memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Batam.

Tabel 2.6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di Sekretariat DPRD

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	e-Parlemen Terintegrasi Digitalisasi proses fasilitasi rapat, reses, dan penginputan Pokir DPRD agar lebih cepat	Inovasi Digitalisasi Pelayanan	Proses administrasi rapat dan reses masih manual sehingga lambat	Efisiensi waktu dan biaya dalam fasilitasi tugas DPRD Transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD meningkat Monitoring Pokir DPRD	Meningkatnya kecepatan pelayanan kesekretariatan kepada DPRD Meningkatnya akurasi dan ketepatan waktu penginputan Pokir Terwujud	RPJMD: % Penyelesaian administrasi DPRD tepat waktu SPBE: Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah

		dan dapat dimonitor secara real time oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.			dapat dilakukan kapan saja	nya tata kelola DPRD yang modern dan berbasis data	
		Portal Keterbukaan Informasi DPRD Penyediaan akses publik terhadap jadwal kegiatan DPRD, produk hukum daerah, dan hasil pengawasan melalui website dan media sosial resmi DPRD.	Inovasi Keterbukaan Informasi Publik	Informasi kegiatan dan produk DPRD belum mudah diakses masyarakat	Masyarakat dapat memantau kinerja DPRD secara terbuka Meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan	Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap DPRD Meningkatkan akses publik terhadap informasi produk hukum dan pengawasan Terwujudnya DPRD yang transparan dan akuntabel	RPJMD: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DPRD SDGs Tujuan 16: Institusi yang transparan & akuntabel KIP: % Informasi publik yang disampaikan secara proaktif
		Command Center Pelayanan DPRD Pemusatan layanan administrasi, persuratan, dan pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD dalam satu	Inovasi Pelayanan Terpadu	Alur pengaduan dan surat masyarakat ke DPRD belum terintegrasi Respon terhadap aspirasi/pengaduan masyarakat lambat Sulit melacak status tindak lanjut surat masuk	Pelayanan administrasi DPRD lebih cepat dan terukur Aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih responsif Mempermudah koordinasi antar bagian di Setwan	Meningkatnya kecepatan respon Setwan terhadap pengaduan masyarakat Meningkatkan kepuasan OPD dan masyarakat terhadap layanan Setwan Terwujudnya layanan kesekretariatan	RPJMD: Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah SPM Urusan Umum: % Surat masuk yang ditindaklanjuti tepat waktu Inovasi Daerah: Jumlah inovasi pelayanan

		sistem terpadu untuk mempercepat respon.				yang prima	n publik
		Telaah Pokir Berbasis Data Pemanfaatan data Bappeda dan OPD dalam proses telaah Pokir agar usulan DPRD lebih tepat sasaran dan terukur.	Inovasi Tata Kelola Perencanaan	Usulan Pokir DPRD belum semua berbasis data dan sasaran RPJMD Sinkronisasi Pokir dengan data kemiskinan, stunting, dan prioritas daerah masih lemah Kualitas telaah Pokir belum didukung data OPD secara real time	Usulan Pokir DPRD lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih Penganggaran daerah lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan Penguatan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD	Meningkatnya % Pokir DPRD yang selaras dengan RPJMD dan data daerah Meningkatkan efektivitas program yang diusulkan DPRD Terwujudnya pembangunan yang adil dan inklusif	RPJMD: % Penurunan Kemiskinan & Stunting RPJMD: % Pokir yang terinput dan sesuai prioritas daerah SDGs: Pengurangan ketimpangan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Sekretariat DPRD Kota Batam adalah: **“Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam”**.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan/dukungan terhadap proses penyelesaian produk hukum oleh DPRD. Sasaran ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan rapat-rapat dan studi banding DPRD dalam proses awal mula pembahasan hingga selesainya suatu produk hukum.
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan Pemerintahan. Untuk peningkatan sasaran kedua ini, perlu mengadopsi strategi digitalisasi layanan (e-government), penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penggunaan teknologi untuk otomatisasi dan analisis data. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat waktu penyelesaian, menurunkan biaya, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan pelayanan yang lebih transparan, responsif, serta akuntabel bagi DPRD/Masyarakat.

Dari hasil Evaluasi Bab II, Sekretariat DPRD Kota Batam menjadikan capaian yang lebih sebagai pemicu untuk menaikkan standar target, dan capaian yang kurang sebagai bahan perbaikan. Dengan demikian, target dan sasaran Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan dukungan Setwan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kota Batam.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam
Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
1.	Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	96
	Meningkatkan Kualitas pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat DPRD	91
	Meningkatnya layanan/dukungan terhadap proses penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase Rancangan Produk Hukum Yang Difasilitasi Oleh DPRD	96

Keterangan:
 Tujuan/sasaran mengacu pada Bab III Renstra Perangkat Daerah

3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan yang pelaksanaannya 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2027 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 (satu) yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dengan visi Bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045.

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang seperti Perangkat Daerah lainnya berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, akan tetapi Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang berbeda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Didalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Karena

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerinatah Provinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	Pengembangan Sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu	Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Penguatan kualitas fasilitasi kegiatan DPRD
			Optimalisasi penyediaan informasi serta layanan administrasi pewrsidangan
			Penguatan komunikasi dan transparansi antara DPRD dengan masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029. Rencana ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah, berkontribusi terhadap target pembangunan nasional, serta mengarusutamakan tematik strategis daerah seperti digitalisasi, inklusi sosial, dan keterbukaan informasi publik, sehingga penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2027

Sekretariat DPRD Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-3 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Sekretariat DPRD Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dengan 56 (lima puluh enam) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Batam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				127.790.637.501							191.409.965.601		
4	02				SEKRETARIAT DPRD				127.790.637.501							191.409.965.601		
					SEKRETARIAT DPRD				127.790.637.501							191.409.965.601		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	94	92 Indek	76.313.582.434							93	101.533.096.700	
						Nilai SAKIP PD	82,40	78,20 Nilai								80,30		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		9 4 percentase	1.143.600							94	84.000.000	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	571.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Kota	2	42.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	571.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	3	42.000.000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		9 4 Persentase	28.946.246.799								95	31.516.686.365
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2 2 2 Orang/bulan	28.719.326.799	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	222	31.193.413.085
4	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15 Dokumen	226.920.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	15	323.273.280
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		9 3 Persentase	327.713.200								94	1.323.082.267

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		222 Paket	156.819.200	Kota Batam	PENDAPATAN DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	242	55.626.267
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30 Orang	170.894.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	18	1.267.456.000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		8 4 Persentase	3.128.948.100								85	5.864.124.078
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	163.891.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	4	544.778.131
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	573.633.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	4	944.694.819

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7 Paket	646.309.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	7	840.091.800
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 Paket	484.172.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memper kuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pemerintah Daerah	9	581.661.745
												Narkoba, Judi, dan Penyelundupan						
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	369.426.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	4	910.378.336

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	295.173.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	2	725.360.510
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	200.395.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	12	450.000.000
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	395.946.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	110	867.158.737

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		8 2 Persentase	827.214.000							85	4.817.366.941	
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit	752.214.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	12	1.100.000.000
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 Unit	75.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	4	125.000.000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		9 3 Persentase	4.261.325.800							93	3.676.750.010	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.992.680.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	12	2.092.680.400
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Laporan	630.063.280	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	8	484.069.610
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.638.582.120	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	12	1.100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		9 2 Persentase	4.290.066.318							93	6.199.229.883	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		50 Unit	245.448.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	5	1.210.000.000
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	639.130.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	20	1.650.000.000
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18 Unit	902.453.719	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	18	992.699.091

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
												Penyelundupan						
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	2.503.034.499	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		PEMERINTAH DAERAH	8	2.346.530.792
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		92 angka	33.694.990.417								93	47.150.996.156
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		5 0 Orang/Bulan	32.905.465.009	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	50	46.118.200.202

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		5 Paket	614.525.408	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	5	785.977.949
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		50 Orang	175.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	50	246.818.005
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD		8 2 persentase	835.934.200								83	900.861.000
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		12 Laporan	54.995.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	12	72.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		9 Laporan	780.938.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	9	828.661.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	94	9 3 persentase	51.477.055.067								94	89.876.868.901
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana		9 2 persentase	2.313.791.400								93	8.237.007.345
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		12 Dokumen	766.119.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	12	2.500.226.386

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		21 Dokumen	1.356.160.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	24	5.064.378.630
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		8 Dokumen	113.210.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	8	372.402.329
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		12 Dokumen	78.301.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	26	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Presentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan		8 5 persentase	2.819.324.000							86	8.453.666.044	
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		75 Dokumen	303.422.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	75	1.384.558.202
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		75 Dokumen	303.422.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	75	1.418.357.018
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		3 Dokumen	401.678.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	3	1.475.528.007

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
											Narkoba, Judi, dan Penyelundupan							
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		3 Dokumen	704.562.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	3	1.577.988.817
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		40 Dokumen	401.678.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	40	1.291.045.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
												Nasional					Provinsi	Daerah
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		40 Dokumen	704.562.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	40	1.306.189.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjuti		9 0 persentase	1.676.895.669								92	3.728.639.756
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		12 Laporan	166.576.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	12	421.078.000
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12 Laporan	166.649.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	12	323.170.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
												Penyelundupan						
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		12 Laporan	166.568.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	12	421.078.000
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		12 Laporan	166.568.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	12	421.078.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		12 Laporan	83.768.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	12	213.238.000	
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		36 Dokumen	926.764.869	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	36	1.428.997.756	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD		8 4 persentase	17.353.639.968							84	28.308.807.967	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		3 Dokumen	3.345.567.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan			DPRD	3	4.728.905.109	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
												Penyelundupan						
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		28 Orang	2.839.889.168	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	28	2.388.140.768
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		8 Orang	623.459.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	9	581.747.504

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		20 Dokumen	592.284.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	20	1.607.350.000	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		20 Dokumen	4.461.615.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	20	13.859.630.586	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		28 Dokumen	5.490.825.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	28	5.143.034.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti		8 5 persentase	12.191.081.030							85	13.847.442.042	
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		52 Dokumen	7.308.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	52	182.291.709
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		9 0 0 Dokumen	12.183.773.030	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	900	13.423.150.333
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi		8 5 persentase	15.122.323.000							87	26.115.142.186	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		96 Dokumen	4.192.709.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	96	11.611.992.500	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		3 Laporan	148.761.300	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	3	498.818.000	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12 Dokumen	2.965.951.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			DPRD	12	4.300.536.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi					Daerah
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		1 3 2 Dokumen	7.814.900.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum , dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3 . Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		DPRD	132	9.703.795.686
									TOTAL:		127.790.637.501		191.409.965.601					

4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Batam disusun sebagai wujud dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Perencanaan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Prioritas Daerah Kota Batam sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Batam Tahun 2027.

Sekretariat DPRD Kota Batam berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian target Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027, khususnya pada Pilar Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas produk hukum daerah, penguatan pengawasan anggaran yang berorientasi pada hasil, dan pemastian bahwa program prioritas nasional seperti penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan penguatan ekonomi daerah menjadi perhatian dalam pembahasan DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Tabel 4.2 Dukungan Program RKPD terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027	Pagu 2027
1	Prioritas 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfataan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 51,477,055,067 .

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator kinerja utama sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 sesuai dengan target pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, untuk tahun 2027 meskipun hasil evaluasi terjadi pelampauan realisasi namun masih dipandang wajar karena disisilain ada yang belum terrealisasi sesuai target. Untuk tahun 2027 target IKU Sekretiar DPRD sebagai mana tabel 5.1 beriku;

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Batam

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Persentase	90 (dari 95)	96	97
2	Presentase Rancangan Produk Hukum Yang Difasilitasi Oleh DPRD	Persentase	94,4 (dari 90)	96	92
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat DPRD	Nilai	90	91	94

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tabel dibawah, Sekretariat DPRD Kota Batam untuk IKK ditahun 2027 masih mengikuti target sesuai dokumen Renstra tahun 2025-2029.

Tabel 5.2. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kota Batam

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD	Nilai	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda	Persentase	90	91

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1 Catatan Penting

Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 - 2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam, maka seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam dalam pelayanan kepada Masyarakat/DPRD.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD